

# RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2023



DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2022



SALINAN

BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 31 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

25. Peraturan Bupati Klaten Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 73);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

## BAB II

### KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III  
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH  
Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

(2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
- c. Inspektorat Kabupaten Klaten;
- d. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten;
- e. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;
- j. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- k. Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
- l. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten;
- m. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
- n. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
- o. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
- q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
- r. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
- s. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten;

- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten;
- v. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten;
- w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;
- x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
- y. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten;
- z. Kecamatan Klaten Utara;
- aa. Kecamatan Klaten Tengah;
- bb. Kecamatan Klaten Selatan;
- cc. Kecamatan Kalikotes;
- dd. Kecamatan Ngawen;
- ee. Kecamatan Kebonarum;
- ff. Kecamatan Wedi;
- gg. Kecamatan Jogonalan;
- hh. Kecamatan Gantiwarno;
- ii. Kecamatan Prambanan;
- jj. Kecamatan Manisrenggo;
- kk. Kecamatan Kemalang;
- ll. Kecamatan Karangnongko;
- mm. Kecamatan Jatinom;
- nn. Kecamatan Karanganom;
- oo. Kecamatan Tulung;
- pp. Kecamatan Polanharjo;
- qq. Kecamatan Delanggu;
- rr. Kecamatan Juwiring;
- ss. Kecamatan Wonosari;
- tt. Kecamatan Ceper;
- uu. Kecamatan Pedan;
- vv. Kecamatan Karangdowo;
- ww. Kecamatan Cawas;
- xx. Kecamatan Trucuk; dan
- yy. Kecamatan Bayat;

(3) Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan / Fotocopy Sesuai dengan Aslinya  
a.n BUPATI KLATEN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap

Ttd

Sri Rahayu, SH. MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 33

# RENCANA KERJA

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2023



DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Teriring puji syukur kehadiran Allah SWT dan atas segala rahmat dan hidayah-Nya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten telah menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023, yang didalamnya memuat gambaran kinerja tahun sebelumnya serta program dan kegiatan yang disusun dalam upaya mewujudkan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten tahun 2021-2026.

Semua kebijakan Rencana Kerja tersebut berorientasi dalam satu kesatuan kerangka tujuan yaitu mewujudkan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima, melalui terbentuknya organisasi dan system kelembagaan daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan daerah, sesuai peraturan yang berlaku, didukung kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah yang semakin professional agar mampu menyelenggarakan ketatalaksanaan pemerintahan yang makin berkualitas untuk menjawab dinamika proses pembangunan daerah yang responsive, transparan dan akuntabel.

Klaten, Juli 2022  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Klaten



**Drs. MUCH NASIR, MM**  
Pembina Utama Muda • 2  
NIP. 19670307 199302 1 002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja organisasi perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang diselaraskan dengan masukan dan aspirasi dari pelaku pembangunan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat Kabupaten, dan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja OPD pada tahun sebelumnya dan tahun sedang berjalan serta mengacu pada kebijakan pemerintah tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Kerja OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten merupakan pedoman bagi Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang dan kepala seksi yang memuat program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya Renja OPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 mempedomani hasil capaian pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya, serta memperhatikan isu strategis yang dihadapi pada tahun pelaksanaan. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dimana isu strategis yang terjadi pada tahun 2022 adalah munculnya wabah pandemi covid-19 yang melanda seluruh penjuru dunia yang efeknya juga berimbas pada rencana arah kebijakan daerah di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, perencanaan daerah di tahun 2023 membutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat dalam rangka pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak dari wabah virus corona di tahun 2020.

Perubahan isu strategis tahun 2023 karena adanya pandemic covid-19, sehingga prioritas rencana pembangunan yang dijabarkan ke dalam program/kegiatan difokuskan pada penyelesaian isu strategis dan permasalahan daerah, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan/atau stabilitas system keuangan, maka program dan kegiatan yang ada dalam belanja langsung perangkat daerah difokuskan sasarannya pada masyarakat yang terdampak pandemic covid-19, terutama Mitigasi Resiko Kesehatan, Jaringan Pengaman Sosial (JPS), serta pemulihan perekonomian untuk dunia usaha dan masyarakat terdampak. Selain itu, sasaran program dan kegiatan perangkat daerah juga ditekankan pada 3 hal antara lain : berorientasi pada keluarga, hasil, manfaat dan dampak yang terukur dengan memperhatikan pada capaian kinerja tahun 2021.

Pada RPJMD 2021-2026 arah kebijakan tahunan menjadi acuan dan penentuan prioritas dan focus pembangunan pada setiap tahunnya. Pembangunan tahun 2023 diarahkan pada "Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Wilayah yang berkelanjutan". Pada prioritas pembangunan tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten diarahkan untuk mendukung prioritas Pengurangan tingkat kemiskinan dan Pengangguran dan Pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Dari prioritas pembangunan tersebut Rancangan Renja OPD 2023 menjabarkan program dan kegiatan sesuai prioritas yang memuat kinerja dengan pagu indikatif dan pendanaan dengan perkiraan maju di tahun berikutnya.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi

- Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
  25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
  26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
  27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  29. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
  30. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
  31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor );
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi

- Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
  46. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
  47. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
  48. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
  49. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
  50. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;
  51. Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
  52. Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.
  53. Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 MAKSUD**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2023 guna memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah tahun 2023, memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan pembangunan daerah bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2023.

#### **1.3.2 TUJUAN**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten tahun 2023 adalah :

1. Diperolehnya suatu rencana pembangunan tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.

2. Diperolehya program-program prioritas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Klaten Tahun 2023.
3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2023 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten Tahun 2023.
4. Tersedianya pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2023 Kabupaten Klaten

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten tahun 2023 yakni :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN ( 2021 )**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Usulan Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V PENUTUP**

- 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD

Pada Renja Tahun 2021 telah ditetapkan 15 Program, 29 Kegiatan dan 59 subkegiatan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsi DISSOSP3AKB yang mencakup 3 urusan pemerintahan yaitu Sosial, PPPA dan Dalduk KB. Pelaksanaan Program/Kegiatan DISSOSP3AKB pada tahun 2021 dapat dikatakan mencapai target yang telah ditentukan dengan rincian sebagai berikut :

a. Realisasi Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah indicator dari Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) yaitu Tahapan Kabupaten Layak Anak dengan target Nindya sedangkan realisasi masih Madya, tidak tercapai. Hal ini dikarenakan cakupan Desa Layak Anak yang belum memenuhi kriteria tingkat Nindya, belum adanya kebijakan terkait Kawasan Tanpa Rokok, serta kurangnya koordinasi secara intensif terkait Larangan Iklan Promosi Sponsor Rokok.

Realisasi Kegiatan/Subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ada 4 kegiatan yaitu :

1. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 85 %
  2. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 81%
  3. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 55%
  4. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 90%
  5. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 75%
  6. Penyediaan Biaya Operasional Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 70%
- b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan ada 60 kegiatan, yaitu :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  10. Pengadaan Mebel
  11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  12. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  18. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT

19. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
20. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
21. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
22. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
23. Pemberian Layanan Kedaruratan
24. Penyediaan Permakanan
25. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
26. Penyediaan Makanan
27. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
28. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
29. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
30. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
31. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
32. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
33. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
34. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
35. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
36. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
37. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
38. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
39. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
40. Perumusan Parameter Kependudukan
41. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
42. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
43. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
44. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
45. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
46. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
47. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
48. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
49. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan

50. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
  51. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
  52. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  53. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- c. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :
- 1) Tidak tercapainya target subkegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK dikarenakan volume pelaksanaan Rapat koordinasi kecamatan tidak dapat dilaksanakan sesuai target akibat aturan PPKM di masa pandemi ;
  - 2) Tidak tercapainya target subkegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang dikarenakan uang harian yang tidak dapat terserap, akan tetapi secara kegiatan sudah terlaksana sesuai target yang direncanakan;
  - 3) Tidak tercapainya target subkegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dikarenakan pada kondisi pandemic tidak diperkenankan untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan yang mengumpulkan banyak orang, yaitu rapat koordinasi teknis terkait penyuluhan dan pengolahan data, sehingga kegiatan ini tidak dapat terlaksana sesuai target;
  - 4) Tidak tercapainya target subkegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB dikarenakan untuk uang harian penyuluhan oleh kader bagi masyarakat tidak dapat terserap akan tetapi untuk frekuensi kegiatan tetap berjalan;
  - 5) Tidak tercapainya target subkegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dikarenakan untuk uang harian penyuluhan oleh kader bagi masyarakat tidak dapat terserap akan tetapi untuk frekuensi kegiatan tetap berjalan. Subkegiatan ini merupakan hasil pemetaan subkegiatan oleh kemendagri, sehingga subkegiatan ini secara substansi sama dengan subkegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB ;
  - 6) Tidak tercapainya target subkegiatan Penyediaan Biaya Operasional Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dikarenakan pada kondisi pandemic tidak diperkenankan untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan yang mengumpulkan banyak orang, yaitu pertemuan penyuluhan kepada masyarakat, sehingga kegiatan ini tidak dapat terlaksana sesuai target;

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan pada 53 kegiatan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Kesesuaian antara perencanaan anggaran dengan kebutuhan riil, misalnya Penyediaan ATK, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - 2) Adanya koordinasi dan dukungan lintas sektoral dalam pelaksanaan kegiatan;
  - 3) Terpenuhinya kebutuhan anggaran pada perubahan anggaran 2021 sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Tidak tercapainya target capaian program Renstra Perangkat Daerah pada tahun n-2 akan berpengaruh pada penyediaan anggaran dan penambahan target capaian pada

tahun n+1 karena kalau hal itu tidak dilakukan maka target pada akhir Renstra kemungkinan besar tidak akan tercapai.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, antara lain :

- 1) Evaluasi pelaksanaan renja agar benar-benar dilakukan per triwulan dengan format yang sesuai dengan ketentuan sehingga deviasi capaian kinerja dan serapan anggaran dapat diketahui sejak awal dan segera dapat dilakukan pembenahan apabila memungkinkan;
- 2) Dari hasil evaluasi pelaksanaan renja apabila ditemukan ketidaksesuaian agar diambil langkah untuk penambahan anggaran jika capaian kinerja belum mencukupi target yang disebabkan oleh kekurangan anggaran.

Adapun evaluasi pelaksanaan program kegiatan secara lengkap disajikan pada lampiran Tabel 2.1

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DISSOSP3APPKB mencakup 3 urusan pemerintahan yaitu Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kinerja pelayanan Perangkat daerah yang meliputi 3 (tiga) urusan pemerintahan tersebut pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada beberapa yang belum sesuai target yang telah ditentukan. Untuk lebih jelasnya sebagaimana uraian di bawah ini :

a. Urusan sosial

- 1) Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS;
- 2) Belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data PMKS;
- 3) Pendanaan untuk jaminan perlindungan social terbatas.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga;
- 2) Belum optimalnya jaminan perlindungan perempuan dan anak.

c. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Belum optimalnya pemerataan advokasi dan pelayanan KB;
- 2) Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya ber-KB;
- 3) Masih rendahnya caupan pelayanan KB di Pedesaan dan Keluarga Pra Sejahtera.

Dengan permasalahan-permasalahan tersebut di atas tentunya berdampak pada capaian kinerja program Renstra, dimana untuk target kegiatan tersebut juga tidak mencapai hasil yang optimal. Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, yakni :

a. Urusan Sosial

- 1) Dilakukan verifikasi dan validasi data sehingga intervensi/penanganan terhadap PMKS dapat tepat sasaran;
- 2) Sinergi dengan sektor lain untuk memberikan jaminan dan perlindungan PMKS;
- 3) Kemitraan dengan pihak lain untuk ikut memberikan bantuan sosial ekonomi;

b. Urusan PPPA

- 1) Penekanan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan pada aspek pencegahan, pelayanan dan penanganan.

c. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Metode KIE yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berKB, serta dukungan kuat pembiayaan, peningkatan sarana prasarana KB yang menjangkau daerah-daerah perdesaan dan Keluarga Pra Sejahtera.

Adapun evaluasi pelaksanaan kinerja pelayanan secara lengkap disajikan dalam lampiran Tabel 2.2

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Persentase PMKS yang tertangani			65	67,5	68	68,5	97,24		68	68,5	
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial			65	65,5	66	66,5	97,24		66	66,5	
3	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas dibagi Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada dikalikan 100			100	100	100	100	100		100	100	
4	Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti			65,5	66	66,5	67			66,5	67	
5		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti						134,37				
6		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti						264,22				
7		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar						111,67				

		Panti										
8		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti						79,47				
9	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)				88,5	89	89,5			89	89,5	
10	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			100	100	100	100			100	100	
11		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		100	100	100	100	100				
12	Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan			100	100	100	100	100		100	100	
13	Indeks Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)			NA	73,34	73,67	74	NA		73,67	74	
14	Nilai Dimensi Prasyarat PUG			NA	70	80	85	NA		80	85	
15	Nilai Dimensi Pelaksanaan PUG			NA	30	45	60	NA		45	60	
16	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	0,3	0,4	0,6	0,7	0,38		0,6	0,7	

17	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar	100	100	100	100	100		100	100	
18	Persentase lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan			30	30	35	40	30		35	40	
19	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak			40,4	40,4	46,2	51,9			46,2	51,9	
20	Persentase desa/kelurahan layak anak			70,1	70,1	76,3	82,5	80,3		76,3	82,5	
21	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar		Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	100	100	100	100	100		100	100	
22	Laju Pertumbuhan Penduduk			0,3	0,28	0,26	0,24	-4,12		0,26	0,24	
23	Total Fertility Rate (TFR)		Total Fertility Rate (TFR)	2,1	2,08	2,06	2,04	1,6		2,06	2,04	
24	Persentase ketersediaan data pembangunan berwawasan kependudukan			83,33	83,33	100	100	83,33		100	100	

25	Persentase ketersediaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan			85,71	85,71	85,71	100	85,71		85,71	100	
26	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	71,5	71,5	72	72,5	70,3		72	72,5	
27	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	15,95	15,95	15,45	14,95	14,45		15,45	14,95	
28	Persentase anggota BKB yang menjadi peserta KB			82	82	83	84			83	84	
29	Persentase anggota BKR yang menjadi peserta KB			75,42	75,42	75,92	76,42			75,92	76,42	
30	Persentase anggota BKL yang menjadi peserta KB			64,88	64,88	65,38	65,88			65,38	65,88	
31	Persentase anggota UPPKS yang menjadi peserta KB			63,29	63,29	63,79	64,29			63,79	64,29	
32	indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)						54				54	

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan pada Dissosp3appkb, pada urusan Sosial sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten pada Tahun 2021 sudah tergolong baik, walaupun apabila dilihat berdasarkan target Indikator Kinerja Program masih jauh dari harapan, dimana realisasi dari target tersebut hanya mencapai angka 97,27%, dimana jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani di Kabupaten Klaten mencapai 97,27%.

Pada urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak keberhasilan capaian indikator kinerja untuk perolehan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) telah diraih pada tahun 2021 yaitu APE tingkat Madya dan penghargaan Kabupaten Layak Anak tingkat Nindya belum dapat diraih. Untuk Kabupaten Layak Anak belum dapat mencapai Nindya salah satunya dikarenakan kurangnya cakupan desa layak anak di kabupaten klaten, seharusnya minimal ada 320 desa layak anak dari 401 desa yang ada di Kabupaten Klaten, saat ini sudah terdapat 322 desa layak anak. Untuk pendampingan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak ini dikarenakan kerjasama dengan Tim P2TP2A yang telah melakukan advokasi dan fasilitasi pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak. Program/kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik, namun perlu upaya beberapa aktivitas yang lebih fokus pada aspek-aspek yang dievaluasi atau dinilai antara lain penanganan tindak kekerasan bisa naik dan bisa turun namun tingkat penyelesaian yang berbeda-beda dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar semakin paham terkait aturan-aturan sehingga korban berani untuk melapor apabila mengalami tindak kekerasan.

Pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana target untuk persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I tidak dapat disajikan datanya, dikarenakan pada pendataan tahun 2021 variabel dan metode pengukuran berbeda dengan pendataan sebelumnya. Program/ kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat kinerja yang baik, namun perlu upaya-upaya beberapa aktivitas yang lebih fokus pada aspek-aspek yang harus ditingkatkan. Untuk capaian drop out KB dan Unmet Need juga masih relatif tinggi.

2. Ketercapaian dan ketidaktercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :
  - a. Rumah Singgah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten masih belum memiliki pelayanan, sarana dan prasarana yang memadai. Untuk ketersediaan kebutuhan dasar pun belum dilakukan secara optimal. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya penanganan masalah sosial di Kabupaten Klaten, karena sarana dan prasarana terbatas.
  - b. Data fakir miskin yang belum update sesuai kondisi di lapangan.
  - c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat optimal.

- d. Penanganan permasalahan sosial yang dilakukan oleh pihak swasta dalam hal yayasan atau perusahaan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibilities*) masih bersifat parsial tidak terorganisir dengan baik, sehingga hasilnya pun kurang maksimal.
  - e. Belum adanya kebijakan terkait Kawasan Tanpa Rokok, serta terkait Larangan Iklan Promosi Sponsor Rokok
  - f. Jumlah SDM pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang kurang memadai, dan Pejabat Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh KB yang terbatas. Untuk menggalakkan program kependudukan maka memanfaatkan adanya kader KB Desa untuk dapat membantu pergerakan dan penyuluhan.
  - g. Alokasi anggaran APBD untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Klaten yang belum seimbang apabila dibandingkan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Klaten.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, pada disosp3akb standar pelayanan minimal terdapat pada urusan sosial. Tingkat capaian kinerja yang rendah tersebut disebabkan oleh jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Klaten sangat besar jumlahnya sedangkan anggaran yang dilimpahkan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Klaten.
4. Tantangan dan peluang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten juga berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang akan lebih baik, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut :
- a. Komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Klaten terhadap penanganan permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan masuknya 3 (tiga) urusan pemerintahan yang ada di DISSOSP3AKB yaitu urusan sosial, PPPA dan Dalduk KB masuk dalam indikator sasaran RPJMD tahun 2021-2026 dan urusan sosial yaitu dalam hal penanganan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan tahun 2023.
  - b. Dukungan dari para *stakeholders* (dunia usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial, dll) terkait penanggulangan permasalahan sosial di masyarakat begitu tinggi, hanya belum terkoordinir dengan baik.
5. Untuk target capaian kinerja per tahun dapat tercapai sesuai target sedangkan dilihat dari pencapaian atas target RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 masih terdapat indikator yang masih belum tercapai yakni tentang penanganan keluarga miskin dan pelayanan terhadap PMKS. Namun demikian ketidaktercapaian tersebut pada hakikatnya tidak mengurangi keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan bidang kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten pada Tahun 2021.

Berkembangnya tahapan Kabupaten Layak Anak dan APE menjadi fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya menyiapkan serta mengusulkan Peraturan daerah dan Peraturan lainnyayang terkait dengan Kabupaten Layak Anak dan PUG.Target berkembangnya kabupaten menuju kota layak anak di 21 kecamatan telah dievaluasi dengan melakukan identifikasi lokasi layak untuk anak, program/kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik, namun perlu upaya beberapa aktivitas yang lebih fokus pada aspek-aspek yang

dievaluasi atau dinilai antara lain terbangunnya komitmen disemua pihak (OPD, Swasta, Masyarakat) untuk menuju kabupaten layak anak tahap Nindya. Dengan adanya berbagai hambatan dan permasalahan di atas tentunya sangat berpengaruh pada tingkat capaian terhadap target Rencana Jangka Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, dimana apabila Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten hanya mengandalkan sumber dana APBD Kabupaten Klaten tentu hasilnya sangat jauh dari harapan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Sosial RI, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Kabupaten Klaten, Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan lain sebagainya.

#### **2.4. Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

1. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2022 bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah yakni penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terkait penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Klaten, dimana pada RKPD tersebut telah ditentukan besaran anggaran Pagu Indikatif untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2023. Adapun pagu indikatif untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 28.327.145.000,- (Dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) peruntukan belanja tersebut ialah untuk membiayai program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Urusan Wajib : Sosial) penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Urusan Wajib non pelayanan dasar), penyelenggaraan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ( Urusan wajib non pelayanan dasar) dan Penyelenggaraan Administrasi Umum (Non-Urusan). Apabila melihat usulan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten terkait anggaran yang dibutuhkan guna pencapaian target RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2023 dan usulan Musrenbang Kabupaten Klaten maka anggaran tersebut cukup memadai, sehingga diharapkan beberapa target kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dapat tercapai sesuai RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.
2. Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara RKPD dengan kebutuhan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 terlampir pada lampiran Tabel 2.4.
3. Pada rumusan RKPD sudah menampung/mengakomodir kebutuhan dari Dissosp3akb, karena pada rumusan ini disusun berdasarkan *breakdown* renstra untuk Tahun anggaran 2023.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

1. Proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi juga secara *bottom up* artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses Musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 tentunya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para *stakeholders* seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten terkait rencana pencapaian target RPJMD Kabupaten Klaten dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Adapun proporsi usulan masyarakat yang harus diakomodir oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Klaten yakni sebesar 30% dari keseluruhan Program dan Kegiatan pada SKPD.

2. Usulan dari masyarakat ini diperoleh melalui proses pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan yang dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Klaten selama bulan Februari 2022. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, hal ini menyebabkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk Tahun 2023.
3. Daftar usulan warga masyarakat yang diakomodir dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagaimana renja Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kabupaten klaten disajikan dalam table 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5.

## Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
	Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Desa Beku	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang Produk Industri Rumah Tangga
		Desa Tawangrejo	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak dan Produk Industri Rumah Tangga
		Desa Tawangrejo, Dukuh Ngasinan	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak dan Produk Industri Rumah Tangga
		Desa Menden	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang tata boga
		Desa Bumiharjo, Dukuh Ngremboko	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak

		Desa Bumiharjo, Dukuh Pusung	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Bumiharjo, Dukuh Margi	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Bumiharjo, Dukuh Ngudi	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Krakitan	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Krakitan	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang Produk Industri Rumah Tangga
		Desa Gondang	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Karang	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Gondangsari	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak

		Desa Dukuh	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Bumiharjo, Dukuh Surowono	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Bumiharjo, Dukuh Glonggong	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Tibayan	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Lemahireng	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Pereng	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Kadilanggon	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Karangduren	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Persandingan antara prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan usulan Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai berikut :

<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Prioritas Provinsi</b>	<b>Prioritas Kabupaten</b>	<b>Program</b>
Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kapasitas & Daya Saing Ekonomi Rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan LH, Pengurangan Resiko Bencana, dalam Rangka Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup, SDA, dan Pengurangan Resiko Bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas SDM Jateng Menuju SDM Jateng yang Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan & Kondusivitas Wilayah serta Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

### 3.1.1 Urusan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psiki, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;

- c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
- d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
- f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial

### **3.1.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak**

Berdasarkan kebijakan nasional sesuai dengan tugas dan fungsi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung terciptanya kondisi sebagai berikut:

#### **a. Kesetaraan Gender**

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

#### **b. Keadilan Gender**

Keadilan Gender adalah suatu kondisi yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran dan fungsinya. Keadilan gender tercipta apabila tidak

terjadi diskriminasi atau ketidakadilan meliputi: (1) stereotype artinya pemberian citra baku atau label/cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat); (2) kekerasan (*violence*) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya; (3) beban ganda (*double burden*), artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya; (4) marjinalisasi artinya suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan; dan (5) subordinasi artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain.

c. Perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan menurut Kemen PPPA<sup>1</sup> adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

d. Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan hak anak adalah segala kegiatan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Hak anak yang harus dipenuhi mencakup sebanyak 31 hak-hak anak yang sesuai dengan hasil Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*).

### 3.1.3 Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada Buku I RPJMN 2020-2024 dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan adalah:

- a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas.
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB.
  - c. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko *drop-out* maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE).
  - d. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga ditingkat masyarakat untuk mendukung pergerakan dan penyuluhan KB.
  - e. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan pergerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB.
  - f. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja.
-

- g. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB.
- h. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB.
- i. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/ kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten sebagaimana dimuat dalam Renstra DISSOSP3AKB Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatnya pencapaian Indeks Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Indeks PUG)
3. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran DISSOSP3AKB sebagaimana tersebut dalam Renstra DISSOSP3AKB Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023
1.	Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	68
2.	Meningkatnya Nilai dimensi prasyarat PUG	Nilai dimensi prasyarat PUG	%	80%
3.	Meningkatnya Nilai dimensi pelaksanaan PUG	Nilai dimensi pelaksanaan PUG	%	45%
4.	Menurunnya angka kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)		2,06

Berbagai sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut di atas, melalui Rencana Kerja Tahun 2023 ini dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu menunjang terhadap ketercapaian berbagai sasaran dari penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Klaten pada Tahun 2023.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten berisi program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan focus pada penuntasan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemic covid-19 melalui peningkatan kualitas infrastruktur serta pengembangan potensi local.

Dengan mempedomani arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023, Rencana Kerja pembangunan dijabarkan ke dalam program target kinerja yang akan dicapai beserta kerangka pendanaan indikatif. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan ditentukan berdasarkan akumulasi standard belanja program dan kegiatan serta mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun 2023.

Indikasi rencana program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten tahun 2023 terdiri dari 15 program dengan 34 kegiatan dan 98 subkegiatan.

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten pada Tahun 2023 tetap merujuk pada aturan-aturan yang tentunya perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain target RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2023, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 maka pada tahun 2023 ini disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun Rancangan Rumusan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah program dan kegiatan DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1.

## **BAB V PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2022 merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas.

### **5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian**

Pelaksanaan program dan kegiatan sangat tergantung pada ketersediaan anggaran. Untuk pelayanan terutama pada penanganan PMKS tergantung anggaran/bantuan sosial yang disediakan baik pemerintah kabupaten klaten, provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah pusat. Capaian kinerja untuk penanganan PMKS mengikuti anggaran yang telah disiapkan, ketika anggaran tidak sesuai kebutuhan maka capaian kinerja untuk penanganan PMKS pun rendah.

### **5.2 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Perangkat Daerah DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman dasar dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja Perangkat Daerah DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Agar pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten tepat waktu dan sasaran, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Rancangan Renja Perangkat DISSOSP3AKB Kabupaten Klaten Tahun 2022 tidak hanya memuat program-program dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta Rencana Kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- b. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN/BLN, maka setiap Perangkat Daerah wajib disinkronkan dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

### 5.3 Rencana Tindaklanjut

Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten ini disusun atas partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum konsultasi publik untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi rencana kegiatan, penjelasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda pembangunan daerah. Dengan *entre-point* (pokok-pokok) rencana, sebagai berikut:

- a. Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan mendukung RKPD Tahun 2023.
- b. Proyeksi rencana belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 28.657.145.000,- (Dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk membiayai 15 program dengan 34 kegiatan dan 98 subkegiatan.

Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga nantinya hasil kinerja penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten tahun 2023 diharapkan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi daerah yakni: ***Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera*** .

Klaten, Juli 2022  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Kabupaten Klaten



**Drs. MUCH. NASIR, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670307 199302 1 002

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Klaten**  
**Nama Perangkat Daerah : DISSOSP3APPKB**

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
	<b>URUSAN SOSIAL</b>									
	<b>BIDANG URUSAN SOSIAL</b>									
1	06	01			100	100	1	100	200	
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditunjang						
1	06	01	2.01		100	100	100	100	200	
				<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase konsistensi perencanaan					
1	06	1	2.01	01	9	9	100	9	18	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan					
1	06	01	2.02		100	100	100	100	200	
				<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi keuangan					
1	06	01	2.02	01	12	12	100	43	55	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji Pegawai Negeri					
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekuensi Perjalanan Dalam Daerah	216	216	100	0	216

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	06	01	2.06		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>			100	100	100	100	200	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik Dan Penerangan			4	4	100	5	9	
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia			62	62	100	970	1032	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Cetakan dan Penggandaan			8	8	100	200	208	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			2	2	100	2400 %	26	
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman Tersedia			775	775	100	48	823	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Perjalanan Luar Daerah			77	77	100	214	291	
1	06	01	2.07		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>			100	100	100	100	200	
					Pengadaan Mebel	Meubelair Terbeli			1	1	100	0	1	
1	06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Peralatan Gedung Kantor Terbeli			7	7	100	10	17	
						Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Terbeli			2	2	100		2	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100				
1	06	01	2.08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>								
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Terkirim			100	100	100	100	200	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening Terbayar			200	175	87,5	300	475	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	THL Administrasi Keuangan			3	3	100	12	15	
						THL Administrasi/Teknis Perkantor			4	4	100		4	
						THL Administrasi/Teknis Perkantor			2	2	100		2	
						THL Kebersihan Kantor			2	2	100		2	
1	06	01	2.09		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>			100	100	100	100	200	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional Terpelihara			10	10	100	39	49	
						THL Pengemudi Kantor			1	1	100	1	2	
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan gedung kantor terpelihara yang ramah anak dan ramah difabel			1	1	100	3	4	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Ke kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1		2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	06 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor Terpelihara				32	32	100	25	57	
			THL Pengamanan Kantor				3	3	100		3	
1	06 02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Prosentase Keluarga Miskin, Penyandang Disabilitas, dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten (TKSK, Pendamping PKH, Karang Taruna, CSR dan Lembaga Kesejahteraan Sosial) yang diberdayakan</b>				99	99	100	97	196	
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan</b>				100	100	100	0	100	
		Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Keluarga Miskin dan Penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan ketrampilan				175	175	100	0	175	
1	06 02 2.03	<b>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase organisasi/lembaga kesejahteraan sosial yang menerima pembinaan dan bantuan</b>				100	100	100	97	197	
			<b>Prosentase organisasi/lembaga yang terfasilitasi</b>				100	100	100		100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100			
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang diberdayakan			26	26	100	26	52	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Karang Taruna aktif, CSR yang disalurkan untuk PMKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan			1	1	100	0	1	
						Lembaga yang diberikan bantuan hibah			5	5	100	5	10	
						Pendamping PKH yang diberdayakan			230	230	100		230	
1	06	04			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial)</b>			30	30	100	65,5	95,5	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	06	04	2.01		<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase (%) anak terlantar, dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial</b>			32	30	93,75	25	55	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Belanja Bantuan Rehabilitasi Sosial			11	11	100	0	11	
						Penyandang Disabilitas, Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang Mendapatkan Bimbingan Sosial			4		0	4	4	
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Anak Rentan yang Mendapatkan Pelayanan			200	200	100	200	400	
						Lembaga Pemberi Layanan Data dan Pengaduan			2	2	100	2	4	
						Lembaga yang diberikan bantuan hibah			2	2	100	0	2	
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang yang mendapat layanan kedaruratan			10	11	110	10	21	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
		Jumlah mobil layanan kedaruratan yang terbeli			1	1	100	0	1	
1	06 04 2.02	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase (%) anak terlantar, dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial</b>		32	32	100	30	62	
1	06 04 2.02 03	Penyediaan Permakanan	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Ditangani		45	125	278	45	170	
1	06 05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial</b>		30	30	100	88,5	118,5	
1	06 05 2.02	<b>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan</b>		80	80	100	80	160	
1	06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Data Keluarga Miskin yang dimutakhirkan		100	100	100	240	340	
		Lembaga Yang Bermitra Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial			253	261	103		261	
1	06 06	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Prosentase korban bencana dan kelompok rentan yang mendapatkan penanganan</b>		30	30	100	100	130	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	06	06	2.01		<b>Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase difabel, trauma dan korban bencana yang telah mendapat bantuan</b>			30	30	100	30	60	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana			10	18	180		18	
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kelompok Rentan yang Mendapatkan Pelayanan Khusus			220	220	100	220	440	
						Lembaga yang diberikan bantuan hibah			2	2	100	0	2	
						Lembaga yang diberikan Bantuan Sosial			1	1	100	0	1	
1	06	06	2.02		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase difabel, trauma dan korban bencana yang telah mendapat bantuan</b>			30	30	100		30	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Taruna Siaga Bencana yang Diberdayakan			50	50	100		50	
1	06	07			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Prosentase peziarah yang mendapat layanan di Taman Makam Pahlawan</b>			30	30	100		30	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
1	06 07 2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Prosentase peziarah yang mendapat layanan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten			32	30	93,75		30	
1	06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Renungan Suci, Apel Kehormatan dan Renungan Suci serta Rehabilitasi TMP			4	4	100		4	
<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>											
<b>BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>											
2	08 02	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>			96,72	N/A	N/A		N/A	N/A
			<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>			60,32	N/A	N/A		N/A	N/A
2	08 02 2.01	<b>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>			96,72	N/A	N/A		N/A	N/A
			<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>			60,32	N/A	N/A		N/A	N/A
2	08 02 2.01 3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Lembaga PUG untuk Penguatan Kelembagaan PUG dan Jumlah OPD yang Paham dan Menerapkan PPRG			20	20	100		20	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	08	02	2.02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase OPD yang menerapkan PPRG</b>			80		0		0	
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pengurus Lembaga Pemberdayaan Perempuan yang Terkoordinasi dan Meningkatkan Kapasitas Bagi Lembaga Perempuan Bidang Politik, Sosial, Hukum dan Ekonomi			0	0			0	
2	08	02	2.03		<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>			96,72		0		0	
						<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>			60,37		0		0	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peserta Pelatihan Peningkatan Taraf Hidup Bagi Perempuan			0	0			0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2 08 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bagi Gabungan Organisasi Perempuan yang Ada di Kabupaten, PKK dan Dharma Wanita Kecamatan			0	0			0	
2 08 03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan</b>			1,35	3,72	275,6		3,72	
2 08 03 2,01	<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>									
2 08 03 2,01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jmlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan			60	60	100		60	
2 08 03 2,02	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>						#DIV/0!		0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Ke kegiatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100				
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan korban kekerasan yang terlayani			20	20	100		20	
2	08	04			<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan			1,35	3,72	275,6		3,72	
2	08	04	2.02		<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan			100		0		0	
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi Kegiatan Organisasi Dharma Wanita Persatuan Secara Rutin Dalam 1 Tahun			12	12	100		12	
2	08	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Persentase OPD yang mampu mengelola data dan informasi gender dan anak yang berkelanjutan			30	30	100		30	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	08	05	2.01							
					80		0		0	
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD/Peserta Sosialisasi yang Mengetahui dan Menerapkan Data Pilah Gender dan Anak			0	
2	08	06			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Tahapan Kabupaten Layak Anak</b>			Madya	
2	08	06	2.01		<b>Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase forum anak yang terlibat dalam Persentase forum anak yang terlibat dalam pengambilan keputusan</b>			0	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Gugus Tugas DLA dan Forum Anak Tingkat Desa yang Mengikuti Pendampingan Tentang Pemenuhan Hak Anak			39	
					Lembaga yang diberikan bantuan hibah				1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	08	06	2.02							
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pertemuan Forum Anak Desa dan Kecamatan Aktif				
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga yang diberikan bantuan hibah				
2	08	07			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Rasio Kekerasan terhadap anak</b>				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2	08	07	2.01		<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>			4,7		0		0	
						<b>Rasio perempuan korban kekerasan</b>			1,3		0		0	
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sekolah Sasaran Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah Terutama Pencegahan Bullying di Sekolah			33	34	103,03		34	
						Forum Anak dan Gugus Tugas DLA			60	0	0		0	
2	08	07	2.02		<b>Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>			4,7		0		0	
						<b>Rasio perempuan korban kekerasan</b>			1,3		0		0	
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kasus/Data Korban Kekerasan yang Ditangani			60	24	40		24	
						Lembaga yang diberikan bantuan hibah			1	1	100		1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
		Anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan pendampingan			25		0		0	
2	08 07 2.03 02	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>		4,7		0		0	
		<b>Rasio perempuan korban kekerasan</b>			1,3		0		0	
2	08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Aparat Penegak Hukum dan DLA yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM tentang Keadilan Restoratif		0	0			0	
2	14	<b>URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>								
		<b>BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>								
2	14 02	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</b>		0,9	-4,12	-458		-4,12	
2	14 02 2.02	<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase keluarga sejahtera I dan Prasejahtera</b>		26		0		0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100				
2	14	02	2.02	01	Perumusan Parameter Kependudukan	Dokumen Kebijakan Terkait Kependudukan			0	1	#DIV/0!		1	
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Dokumen Profil Kependudukan			1	1	100		1	
2	14	03			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase Peserta KB Aktif</b>			70	70,3	100,4		70,3	
2	14	03	2.01		<b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)</b>			65,06		0		0	
						<b>Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi/ Drop out KB</b>			4,95		0		0	
						<b>Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)</b>			8,91		0		0	
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Koordinasi/Pertemuan Terkait Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan Mitra Kerja			1	1	100		1	
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Media KIE			5	5	100		5	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100				
2	14	03	2,01	04	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Frekuensi Promosi KIE di Luar Gedung			35	26	74,3		26	
2	14	03	2,01	05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPk	Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Harganas			1	1	100		1	
2	14	03	2,01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk	Jumlah Balai KB yang mendapat biaya operasional			21	21	100		21	
2	14	03	2,02		<b>Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB</b>	<b>Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)</b>			65,06		0		0	
						<b>Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi/ Drop out KB</b>			4,95		0		0	
						<b>Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)</b>			8,91		0		0	
2	14	03	2,02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPk di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Frekuensi Pembinaan di lini Lapangan			1	4	400		4	
2	14	03	2,02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Balai KB yang dibangun			2	2	100		2	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100			
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Frekuensi Pembinaan di lini Lapangan		3	3	100		3				
2	14	03	2,03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)			65,06		0			
					Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi/ Drop out KB			4,95		0			
					Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)			8,91		0			
2	14	03	2,03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Frekuensi Visitasi Faskes			4	3	75		3
					Ketersediaan Alokasi di Faskes			80	80	100		80	
2	14	03	2,03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Akseptor KB MKJP			1500	2237	149,1		2237

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100				
2	14	03	2,03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kegagalan MKJP yang Terayomi			8	4	50		4	
2	14	03	2,03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penggerakan Pelayanan KB			0	0			0	
2	14	03	2,03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah IUD Kit yang terbeli			10	10	100		10	
						Jumlah sepeda motor yang terbeli			1	1	100		1	
						Jumlah Balai KB yang dibangun			2	2	100		2	
2	14	03	2,03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jenis Kelompok remaja yang diberikan pembinaan (Genre dan Saka Kencana)			1	2	200		2	
2	14	03	2,03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Frekuensi Kegiatan Pelayanan KB dengan Muyan			0	4	#DIV/0!		4	
2	14	03	2,04		<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)</b>			65,06		0		0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
		Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi/ Drop out KB			4,95		0		0	
		Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)			8,91		0		0	
2	14	03	2,04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kampung KB yang terbentuk			0	
2	14	03	2,04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah pertemuan Kampung KB			10	3
2	14	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Persentase Keluarga Pra Sejahtera</b>			28	N/A
2	14	04	2,01		<b>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)</b>			65,06	0
		Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi/ Drop out KB			4,95		0		0	
		Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)			8,91		0		0	
		Persentase Keluarga Sejahtera I dan Prasejahtera			26		0		0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Sub Kegiatan (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100			
2	14	04	2,01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah BKB Kit Stunting terbeli			10	10	100		10	
						Jumlah Kit Siap Nikah anti stunting yang terbeli			5	5	100		5	
2	14	04	2,01	06	Penyediaan Biaya Operasional Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah desa stunting yang akan dilakukan pembinaan calon pengantin			10	10	100		10	
						Jumlah desa tereduksi stunting			10	10	100		10	
2	14	04	2,01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Frekuensi Pembinaan Kelompok Kegiatan			0	4			4	



Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

**Kabupaten Klaten**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Persentase PMKS yang tertangani			65	67,5	68	68,5	97,24		68	68,5	
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial			65	65,5	66	66,5	97,24		66	66,5	
3	Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti			65,5	66	66,5	67			66,5	67	
4		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		100	100	100	100	134,37				
5		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti		100	100	100	100	264,22				
6		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		100	100	100	100	111,67				

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
7		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti		100	100	100	100	79,47				
8	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)				88,5	89	89,5			89	89,5	
9	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			100	100	100	100			100	100	
10		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial						100				
11	Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan			100	100	100	100	100		100	100	
12	Indeks Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)			NA	73,34	73,67	74	NA		73,67	74	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
13	Nilai Dimensi Prasyarat PUG			NA	70	80	85	NA		80	85	
14	Nilai Dimensi Pelaksanaan PUG			NA	30	45	60	NA		45	60	
15	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	0,3	0,4	0,6	0,7	0,38		0,6	0,7	
16	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar	100	100	100	100	100		100	100	
17	Persentase lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan			30	30	35	40	30		35	40	
18	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak			40,4	40,4	46,2	51,9			46,2	51,9	
19	Persentase desa/kelurahan layak anak			70,1	70,1	76,3	82,5	80,3		76,3	82,5	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
20	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar		Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	100	100	100	100	100		100	100	
21	Laju Pertumbuhan Penduduk			0,3	0,28	0,26	0,24	-4,12		0,26	0,24	
22	Total Fertility Rate (TFR)		Total Fertility Rate (TFR)	2,1	2,08	2,06	2,04	1,6		2,06	2,04	
23	Persentase ketersediaan data pembangunan berwawasan kependudukan			83,33	83,33	100	100	83,33		100	100	
24	Persentase ketersediaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan			85,71	85,71	85,71	100	85,71		85,71	100	
25	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	71,5	71,5	72	72,5	70,3		72	72,5	
26	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	15,95	15,95	15,45	14,95	14,45		15,45	14,95	
27	Persentase anggota BKB yang menjadi peserta KB			82	82	83	84			83	84	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
28	Persentase anggota BKR yang menjadi peserta KB			75,42	75,42	75,92	76,42			75,92	76,42	
29	Persentase anggota BKL yang menjadi peserta KB			64,88	64,88	65,38	65,88			65,38	65,88	
30	Persentase anggota UPPKS yang menjadi peserta KB			63,29	63,29	63,79	64,29			63,79	64,29	
31	indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)						54				54	

**Tabel 2.4**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Kabupaten Klaten**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>6.714.946.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>6.905.034.657</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>60.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>80.000.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	9 Dokumen	45.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	80.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	4 Dokumen	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>5.415.446.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>5.711.244.657</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	45 Orang	5.400.446.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45 Orang	5.696.244.657	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun	12 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	12 Laporan	10.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	4 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>283.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>210.291.040</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	5 Unit	4.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.271.040	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	970 Unit	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	44.370.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	4 Unit	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	5.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	200 Eksempl	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	24.850.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	24 Eksempla	4.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	2.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	48 Kali	60.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	53.800.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214 Kali	160.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100 Laporan	75.000.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>255.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>130.000.000</b>	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	6 Unit	180.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	130.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	20 Unit	75.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>333.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>308.858.960</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Surat Terkirim	300 Eksempl	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.700.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	110.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar	11 Orang	220.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	232.158.960	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>368.500.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>464.640.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	40 Unit	258.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	219.640.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya terhabilitasi/terpelihara	3 Unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	195.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya terhabilitasi/terpelihara	5 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terhabilitasi	25 Unit	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terhabilitasi/terpelihara	25 Unit	25.000.000						
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>				<b>1.591.777.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>				<b>1.473.177.000</b>	
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>1.591.777.000</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>1.473.177.000</b>	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah TKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	26 Orang	693.600.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	707.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	6 Lembaga	843.177.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3850 Keluarg	730.177.000	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah SDM Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapat peningkatan kapasitas	5 Orang	55.000.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	36.000.000	
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				<b>3.257.931.000</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				<b>1.506.517.000</b>	
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>				<b>2.792.931.000</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>				<b>1.096.511.000</b>	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jenis disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat yang mendapat bimbingan sosial	4 Jenis	2.052.116.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2750 Orang	817.501.000	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan.	340 Orang	15.000.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Orang	11.840.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.	340 Orang	60.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Orang	10.360.000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah keluarga anak rentan yang mendapatkan pelayanan Jumlah lembaga pemberi layanan data dan pengaduan	210 Keluarga 2 Lembaga	577.115.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	212.770.000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah orang yang diberikan layanan kedaruratan	10 Orang	18.700.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan	10 Orang	14.250.000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	50 Orang	55.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	14.800.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk.	340 Orang	15.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Orang	14.990.000	
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>				<b>465.000.000</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti</b>				<b>410.006.000</b>	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan permakanan	50 Orang	55.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	55.000.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah PMKS lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA yang mendapat layanan bimbingan sosial	50 Orang	240.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	280.206.000	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan	50 Orang	55.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	7.400.000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan penelusuran	50 Orang	55.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	7.400.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	50 Orang	55.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	55.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan rujukan	50 Orang	5.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	5.000.000	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>				<b>515.938.000</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>				<b>2.074.464.343</b>	
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>515.938.000</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>2.074.464.343</b>	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah keluarga miskin yang terverifikasi dan validasi	210000 Kelu	105.585.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	735000 oran	106.600.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	jumlah desa yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	260 Desa	110.353.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	60000 Keluar	245.735.343	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan sosial	60000 Keluar	100.000.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60000 Keluar	413.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah lembaga yang difasilitasi bantuan sosial ekonomi	20 Lembaga	200.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	1.309.129.000	
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>				<b>1.395.730.000</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>				<b>325.275.000</b>	
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>				<b>1.362.455.000</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>				<b>292.000.000</b>	
	Penyediaan Makanan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	230 Orang	180.555.000	Penyediaan Makanan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	130 Orang	50.000.000	
	Penyediaan Sandang	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	230 Orang	110.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan	130 Orang	50.000.000	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	10 Unit	100.000.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit	50.000.000	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah kelompok rentan yang mendapatkan bantuan sosial/penanganan khusus	230 Orang	911.900.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	112.000.000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	230 Orang	60.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	30.000.000	
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>				<b>33.275.000</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>				<b>33.275.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan	50 Orang	33.275.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	33.275.000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>				<b>183.431.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>				<b>115.431.000</b>	
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>				<b>183.431.000</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>				<b>115.431.000</b>	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	4 Unit	108.431.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.431.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah sarana prasarana Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	4 Unit	75.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan	1 Makam	65.000.000	
	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				<b>237.964.000</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>				<b>106.000.000</b>	
	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>87.964.000</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>53.000.000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	2 Kali	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	1 Kali	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan	1 Kali	3.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Jenis Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	4 Jenis	15.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	5.000.000	
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah OPD/Kelurahan/Desa yang mengikuti pelatihan PPRG	20 OPD	47.964.000	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan	20 Perangkat Daerah	20.000.000	
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>90.000.000</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>45.000.000</b>	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Peserta sosialisasi Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100 Orang	25.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	1 Dokumen	20.499.440	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50 Orang	65.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Organisas	24.500.560	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>60.000.000</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>8.000.000</b>	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya lembaga (managemen kasus) penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan	10 Orang	5.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	10 Orang	5.000.000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peserta KIE tentang Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan yang dilaksanakan	300 Orang	55.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	3.000.000	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				<b>238.359.000</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>				<b>40.000.000</b>	
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>36.055.000</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>15.000.000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan/Kekerasan terhadap perempuan	4 Kali	26.095.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	4 Dokumen	0	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Frekuensi Rakor penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	12 Kali	9.960.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Perangkat Daerah	15.000.000	
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>187.304.000</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>10.000.000</b>	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Layanan Pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	11 Lembaga	10.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan	15 orang	10.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kali	177.304.000						
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>15.000.000</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>15.000.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan terkait layanan bagi perempuan korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	5.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	15.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah penerima bantuan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	20 Orang	10.000.000	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	umlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	15 Orang	0	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>				<b>148.728.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>				<b>110.000.000</b>	
	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>148.728.000</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>110.000.000</b>	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	35 Orang	70.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan	52 Perangkat Daerah	70.000.000	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kali	68.728.000	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	5.000.000	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peserta sosialisasi ketahanan keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarga	10 Lembaga/	10.000.000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 laporan	35.000.000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>				<b>34.703.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>				<b>15.000.000</b>	
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>34.703.000</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>15.000.000</b>	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah dokumen data gender dan anak yang tersedia	1 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	5.000.000	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah OPD yang memiliki data pilah gender	20 OPD	24.703.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Dokumen	10.000.000	
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>				<b>323.234.000</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>				<b>203.000.000</b>	
	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>72.234.000</b>	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>102.000.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah OPD peserta advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak	40 OPD	51.234.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	52 Organisasi	87.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	40 Orang	21.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	20 Dokumen	15.000.000	
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>251.000.000</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>101.000.000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	20 Forum Anak	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi KIE pemenuhan Hak Anak bagi lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	900 Kali	155.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	74.000.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10 Lembaga	81.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	27.000.000	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>				<b>484.255.000</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>				<b>45.000.000</b>	
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>273.304.000</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>10.000.000</b>	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kali	96.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan	4 Perangkat Daerah	10.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	177.304.000						
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>161.856.000</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>5.000.000</b>	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang tersedia	11 Lembaga	96.856.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	4 Kali	60.000.000						
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah peserta pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	30 Orang	5.000.000						
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>49.095.000</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>30.000.000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	2 Kali	11.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	2 Laporan		0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi koordinasi dan sinkronisasi penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Kali	26.095.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan	4 Dokumen	19.500.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	12 Kali	12.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	12 Dokumen	10.500.000	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>				<b>521.338.000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>				<b>687.573.000</b>	
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>				<b>48.538.000</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>				<b>27.538.000</b>	
	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah institusi pendidikan kerjasama kependudukan	2 Institusi/Le	27.538.000	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	2 Dokumen	27.538.000	
	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi Sosialisasi pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	2 Kali	21.000.000						
	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>472.800.000</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>660.035.000</b>	
	Perumusan Parameter Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan Terkait penyusunan Dokumen Kebijakan terkait	2 Kali	32.000.000	Perumusan Parameter Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1 dokumen	31.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	2 Dokumen	16.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	15.000.000	
	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	jumlah dokumen kajian dampak kependudukan	1 Dokumen	40.000.000	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	63 Unit	30.000.000	
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso			10.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	4 Dokumen	422.735.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan Terkait penyusunan Dokumen Profil kependudukan	2 Kali	374.800.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 dokumen	160.800.000	
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>				<b>8.871.602.000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>				<b>8.680.488.000</b>	
	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>				<b>1.969.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>				<b>1.444.115.000</b>	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan Terkait Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan mitra kerja	5 Kali	44.000.000	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada	7 Organisasi	44.375.000	
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah jenis sarana KIE program KKBPK yang tersedia dan terdistribusi	5 Jenis	257.692.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	25.000.000	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Promosi KIE Luar Gedung	35 Kali	67.308.000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	78.640.000	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah balai penyuluhan KKBPK yang dilakukan pengelolaan operasional dan sarananya	24 Unit	1.600.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	3 Laporan	405.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	24 Laporan	850.500.000	
						Pengendalian Program KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	40.000.000	
					<b>1.974.800.000</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>				<b>1.924.800.000</b>	
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB tersedia	5 Unit	50.000.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	4089 orang	1.924.800.000	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi penggerakan kader	4 Kali	1.924.800.000						
					<b>3.593.194.000</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>4.242.073.000</b>	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya yang mendapatkan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB	88 Faskes	255.300.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	48.150.000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah akseptor MKJP	2700 Aksept	2.067.633.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2700 Orang	2.855.571.000	
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah kasus komplikasi dan kegagalan pemasangan alat kontrasepsi	8 Kasus	5.000.000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	15 Laporan	10.000.000	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB tersedia	10 Unit	1.122.313.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	7 Unit	1.206.455.000	
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi pembinaan kelompok remaja	6 Kali	90.068.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan	12 Laporan	35.400.000	
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi pelayanan KB Bergerak menggunakan mobil unit pelayanan	5 Kali	52.880.000	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas	290 orang	50.000.000	
						Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	5 Laporan	36.497.000	
					<b>1.334.608.000</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>				<b>1.069.500.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah kampung KB yang terbentuk	10 Buah	50.000.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di	71 kampung	1.069.500.000	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah lokasi pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK	26 Lokasi	1.284.608.000						
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>				<b>915.465.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>				<b>6.370.185.000</b>	
	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>				<b>905.465.000</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>				<b>6.364.185.000</b>	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang terbeli	15 Unit	230.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	866.340.000	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang mendapat biaya operasional	15 kelompok	594.800.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2913 orang	5.397.180.000	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Kali	50.665.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Kelompok	45.000.000	
	Advokasi dan Promosi IPK	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah frekuensi Advokasi dan Promosi IPK (Indeks Pembangunan Keluarga)	3 Kali	30.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 laporan	40.665.000	
						Advokasi dan Promosi IPK	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks)	30 orang	15.000.000	
	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>				<b>10.000.000</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>				<b>6.000.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Frekuensi pembinaan kelompok ketahanan keluarga (BKB,BKL,BKR,UPPKS) bersama mitra kerja/ormas	3 Kali	10.000.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Klaten, Klaten Selatan, Tegalyoso	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	1 Organisasi	6.000.000	
					<b>25.435.401.000</b>					<b>28.657.145.000</b>	

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Kabupaten Klaten Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN</b>				
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah				
	Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Desa Beku	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang Produk Industri Rumah Tangga
		Desa Tawangrejo	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak dan Produk Industri Rumah Tangga
		Desa Tawangrejo, Dukuh Ngasinan	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak dan Produk Industri Rumah Tangga
		Desa Menden	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang tata boga
		Desa Bumiharjo, Dukuh Ngremboko	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Bumiharjo, Dukuh Pusung	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Bumiharjo, Dukuh Margi	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Bumiharjo, Dukuh Ngudi	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Krakitan	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Krakitan	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang Produk Industri Rumah Tangga
		Desa Gondang	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Karang	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Gondangsari	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Dukuh	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Bumiharjo, Dukuh Surowono	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Bumiharjo, Dukuh Glonggong	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Tibayan	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Lemahireng	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Pereng	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak
		Desa Kadilanggon	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Desa Karangduren	Jumlah lembaga yang difasilitasi	1 lembaga	Pembinaan bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) tentang beternak